

NAMA : NURMAKIA HEPI

NPM : 2216041111

KELAS : REGULER C

**PERANAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN RAJABASA**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan serta memperbaiki infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, serta sarana dan prasarana penunjang. Selain itu, mereka juga berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Meskipun begitu, seringkali masalah-masalah ini berakar pada pertumbuhan penduduk yang cepat, tingginya angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak reproduksi. Keprihatinan terhadap isu-isu kependudukan telah memunculkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan atau pembangunan berkelanjutan. Dari sinilah kesadaran global muncul untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendekatan kependudukan.

Masalah kependudukan adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek di dalamnya. Beberapa masalah kependudukan yang umum dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia diantaranya : 1) Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yaitu Jika pertumbuhan penduduk suatu negara terlalu cepat dan tidak seimbang dengan sumber daya yang tersedia, ini dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 2) Ketimpangan demografi adalah ketimpangan dalam komposisi demografi, seperti perbandingan antara jumlah penduduk muda dan tua, dapat memengaruhi kebijakan sosial, kesejahteraan, dan

perencanaan masa depan. 3) Keterbatasan sumber daya dimana pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menguras sumber daya alam, seperti air bersih, makanan, dan energi, yang dapat menyebabkan konflik atas sumber daya tersebut. 4) Pengaruh terhadap lingkungan yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga dapat berdampak negatif pada lingkungan, termasuk deforestasi, polusi, dan perubahan iklim.

Menurut proyeksi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi masalah serius. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang cepat dengan ketersediaan sumber daya pendukung dan dampak lingkungan adalah permasalahan besar yang perlu diatasi oleh pemerintah Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan. Tingginya pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang signifikan, dan ketidakmerataan pertumbuhan penduduk adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang menghadapi masalah pertumbuhan penduduk adalah Lampung. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, populasi (penduduk) Lampung telah mencapai 9.176.546 jiwa, dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota, yang merupakan kota terbesar kesembilan di Indonesia. Kota ini memiliki wilayah seluas 183,72 km² dan penduduk sekitar 1.209.937 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota terpadat di Provinsi Lampung. Salah satu wilayah di Bandar Lampung yaitu di Kecamatan Rajabasa, terdapat 7 kelurahan dengan lebih dari 60.000 jiwa penduduk dan luas wilayah sekitar 13,53 km² yang memiliki kepadatan penduduk di atas 50.000 jiwa.

Kota Bandar Lampung telah berkembang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Lampung. Sebagai pusat Provinsi Lampung, kota ini menyediakan berbagai fasilitas publik dan pelayanan untuk wilayah lain di provinsi ini, seperti perdagangan, layanan jasa, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Dengan pertumbuhan Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, jumlah penduduknya terus meningkat setiap tahun. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Rajabasa, yang dari data tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan populasi yang signifikan. Informasi tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Total Penduduk
1.	2014-2018	50.710
2.	2019	51.578
3.	2020	57.589
4.	2021	58.522
5.	2022	60.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Dari tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, terus meningkat. Pada tahun 2014-2018, jumlah penduduknya mencapai 50.710 jiwa. Pada tahun 2019, jumlah tersebut naik sebesar 1% menjadi 51.578 jiwa. Peningkatan berlanjut di tahun 2020, meningkat 1,1% menjadi 57.589 jiwa. Sama halnya di tahun 2021 dan 2022, jumlah penduduk terus meningkat sebesar 1% menjadi 60.000 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk ini, kepadatan penduduk Kecamatan Rajabasa mencapai 4.325 jiwa per km². (Sumber: lampung.bps.go.id).

Salah satu alasan utama percepatan pertumbuhan penduduk yang signifikan adalah tingginya tingkat urbanisasi, yaitu ketika penduduk pindah dari desa ke kota. Fenomena ini menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, meningkat setiap tahunnya. Penting untuk diingat bahwa dampak dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup di suatu daerah. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani dengan serius, maka akan semakin sulit untuk mengatasi masalah penduduk ini.

Jumlah penduduk yang tinggi adalah tantangan yang kompleks dalam mengatasi isu kependudukan. Diperlukan usaha berkelanjutan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, seperti melalui kebijakan pemerintah seperti Program Keluarga Berencana (KB). Meskipun demikian, program ini menghadapi berbagai

tantangan, termasuk penurunan peserta KB dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ini.

Permasalahan-permasalahan kependudukan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi berbagai isu terkait pertumbuhan penduduk. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia mengembangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengatasi dan mengendalikan permasalahan tersebut. Program ini diberikan mandat kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pembangunan dalam aspek kependudukan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia sehingga penduduk dapat berkontribusi secara efektif dan produktif dalam pembangunan. Upaya ini mencakup koordinasi dengan berbagai kegiatan lain seperti kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Pengendalian pertumbuhan penduduk melibatkan pengurangan tingkat kelahiran dan angka kematian, terutama kematian ibu dan anak, melalui program keluarga berencana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Keluarga berencana adalah usaha mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan dengan mempromosikan, melindungi, dan memberikan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mencapai keluarga berkualitas.

Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Mochtar, 1998). Tujuannya adalah membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengendalikan kelahiran (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004). Menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Keluarga Berencana adalah usaha meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan memperlambat usia perkawinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (Arum, 2008).

Sejak sepuluh tahun belakangan ini, negara mengalami kegagalan dalam mempromosikan dan mengimplementasikan Keluarga Berencana, kenyataan ini tidak bisa disangkal. Kegagalan ini bukan karena penghentian keterlibatan TNI dalam program KB, tetapi lebih disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,

yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984, menetapkan bahwa negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang perawatan kesehatan. Ini mencakup perawatan yang pantas terkait dengan kehamilan, sebelum dan setelah persalinan, serta pelayanan KB dan pemberian makanan bergizi secara cuma-cuma. Namun, sejak reformasi, di mana pemerintah memiliki kewajiban terhadap IMF (International Monetary Fund) dan diwajibkan menjalankan program Penyesuaian Struktural, termasuk penghapusan program pelayanan kesehatan dan KB gratis. Sejak saat itu, pelayanan KB untuk masyarakat, terutama kelompok miskin, diabaikan (Anggraini dan Martini, 2011).

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat diperlukan agar program Keluarga Berencana (KB) dapat berhasil terlaksana. Seperti yang diungkapkan oleh Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011), partisipasi mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan, dan evaluasi program. Namun, ada masalah yang muncul terkait dengan keyakinan dan pandangan masyarakat terhadap program KB. Beberapa individu masih meyakini bahwa KB tidak sesuai atau dianggap sebagai hal yang dilarang. Mereka menolak program KB secara terbuka.

Faktor ekonomi juga berperan dalam menghambat partisipasi masyarakat dalam program KB. Pelayanan KB seringkali memerlukan biaya, baik melalui fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Beberapa daerah mungkin menyediakan alat kontrasepsi secara gratis, tetapi biaya operasional masih menjadi beban bagi peserta. Ini dapat menghambat akses bagi individu dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini berdampak pada pilihan jenis alat kontrasepsi dan metode KB yang dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah mungkin kesulitan membeli alat kontrasepsi di pasar, yang akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang tinggi dan berpengaruh pada efektivitas serta partisipasi dalam program KB.

Hasil dari pelaksanaan kebijakan kependudukan terkait program KB secara kuantitatif telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih ada beberapa tantangan yang muncul di lapangan, salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan data dari lampung.antaranews.com, jumlah peserta KB aktif di Kota Bandar Lampung hingga bulan Agustus 2022 adalah sebanyak 66.696 peserta. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan hasil yang memuaskan. (lampung.antaranews.com)

Ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, di antaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat atau peserta KB, serta akses informasi yang mereka gunakan. Selain itu, media sosial juga menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah. Sebagai contoh, menurut Nasrullah dalam Mulawarman (2017), perkembangan jumlah pengguna media sosial yang terus meningkat menunjukkan pengaruh besar internet dalam kehidupan masyarakat. Penelitian lain oleh We Are Social dan Hoosuite juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat aktif di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya, dengan lebih dari 212,9 juta pengguna aktif.

Media sosial memiliki daya tarik yang tinggi bagi pengguna karena memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberikan komentar, serta berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, media sosial dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kebijakan atau program pemerintah. Saat ini, media sosial telah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk mengakses informasi umum dan luas.

Media sosial adalah alat pengakses informasi yang memungkinkan bersosialisasi di antara pengguna, dengan definisi oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai “aplikasi berbasis internet yang memanfaatkan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna.” Jejaring sosial memungkinkan pembuatan halaman pribadi dan komunikasi dengan teman-teman untuk berbagi informasi. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam berkomunikasi. Bentuk kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sangat terkait dengan komunikasi, dan media sosial menjadi alat berpengaruh dalam proses ini.

Indonesia menempati peringkat ke-10 dalam daftar ini, dengan penggunaan media sosial rata-rata sekitar 197 menit atau sekitar 3,2 jam per hari. Riset ini juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia menghabiskan hampir 3 jam untuk terhubung dan menjelajahi media sosial melalui perangkat seluler. Jumlah pengguna media sosial yang besar di Indonesia memberikan peluang untuk mengoptimalkan

kehadiran media sosial sebagai alat komunikasi dan sumber informasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemasaran, politik, dan pembelajaran.

Dalam Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) Tahun 2017, tingkat akses masyarakat terhadap Media Massa, seperti membaca surat kabar/majalah, mendengarkan radio, atau menonton televisi, termasuk penggunaan internet. Responden yang mengakses media massa paling sedikit sekali seminggu dianggap mengakses secara reguler. Akses melalui media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan, serta dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Informasi tentang kesehatan dan keluarga berencana perlu diketahui oleh seluruh penduduk dan dapat diakses melalui media konvensional maupun internet. Pada tahun 2017, perkembangan media sosial pada BKKBN dimulai dengan berdirinya Website BKKBN, akun Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube yang dikelola oleh Direktorat. Perubahan dalam perkembangan pelayanan Program BKKBN selama periode tersebut telah berdampak positif pada kebijakan dan pelayanan Program BKKBN yang lebih modern.

Dengan demikian, pihak pemerintah dapat menggunakan hal ini sebagai alat untuk mengkomunikasikan berbagai program andalan mereka kepada masyarakat melalui media sosial. Kebijakan dan program pemerintah seharusnya bisa berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang ada, karena salah satu indikator keberhasilan kebijakan yang melibatkan masyarakat adalah tingkat partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Tingkat partisipasi ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, interaksi melalui media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk memahami dan merespons kebutuhan serta masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Tallo Kota Makassar" yang membahas media sosial menjadi pusat komunikasi dan berbagi informasi sehingga dapat digunakan sebagai media untuk komunikasi dan sosialisasi, salah satunya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam berkomunikasi. Misalnya dalam hal ini masyarakat dapat mendapatkan informasi mengenai program keluarga berencana lewat website BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), youtube, instagram, dan media sosial lainnya.

Penelitian ini membahas seberapa besar pengaruh media sosial sebagai media informasi dalam melihat partisipasi masyarakat pada program keluarga berencana tersebut. Penelitian tentang pengaruh media sosial dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam program KB (Keluarga Berencana) belum banyak diteliti (Penelitian yang banyak ditemukan biasanya secara terpisah yaitu "Peran Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat" atau "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana") sehingga penulis ingin meneliti hal tersebut agar selalu mendapatkan informasi terbaru terkait partisipasi masyarakat program KB yang diketahui lewat media sosial.

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Media Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Rajabasa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons responden terhadap penggunaan media sosial?
2. Bagaimana respons responden terhadap partisipasi dalam program Keluarga Berencana?
3. Apakah penggunaan media sosial memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi respons responden terhadap penggunaan media sosial.
2. Untuk mengidentifikasi respons responden terhadap partisipasi dalam program Keluarga Berencana.
3. Untuk mengidentifikasi apakah penggunaan media sosial memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca. Contohnya membantu menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media sosial dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial yang sensitif seperti perencanaan keluarga. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi referensi penting untuk studi-studi berikutnya yang terkait dengan media sosial dan partisipasi masyarakat dalam implementasi program keluarga berencana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah memberikan masukan dan evaluasi yang berharga bagi para pengambil kebijakan terkait Peranan Media Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program keluarga berencana dan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung serta mengetahui efektivitas program keluarga berencana dengan membantu pihak terkait dalam program KB di Kecamatan Rajabasa untuk meningkatkan efektivitas kampanye mereka melalui media sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Iriany, I. S., Purnawan, A., & Nugraha, A. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 9-16.
- Mulyana, N., & Asiah, D. H. S. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui program Keluarga Berencana. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 93-103.
- Bawing, P., Padmawati, R. S., & Wilopo, S. A. (2017). Analisis pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana: studi kasus di Malinau. *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal of Community Medicine and Public Health)*.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18-29.
- Ma'ruf, A. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Yogyakarta: Aswaja Pressindo*.
- Prijatni, I., Prijatni, I., & Rahayu, S. (2016). Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- Matahari, R., KM, S., Utami, F. P., KM, S., & Sugiharti, I. S. (2019). Buku Ajar *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Pustaka Ilmu.